



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 273/SEK/KP.01.2/05/2018

8 Mei 2018

Lampiran :

Hal : Kepatuhan Penyampaian LHKPN secara
Elektronik (e-LHKPN)

Yth. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

di

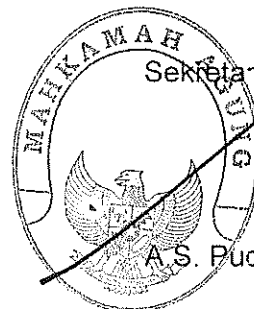
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam pengisian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 masih dapat dilaporkan walau batas akhir waktu pelaporan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Maret 2018 telah berakhir, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang, Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Untuk itu diingatkan kembali kepada para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum menerima hak akses LHKPN secara online melalui aplikasi e-FILING serta belum mengisi dan mengirimkan LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) untuk segera mengisi dan memperbaharui LHKPN dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Adapun, untuk informasi berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya dapat diakses melalui <http://bit.ly/2yTCESk> dan panduan pengisian/ *User Manual e-Filing* dapat diakses melalui <https://goo.gl/xT6MqU> dan <https://goo.gl/48GGT4>

Di samping itu pula, guna mendukung kelancaran aktivasi e-LHKPN kiranya bagi para PN/WL yang belum menerima hak akses LHKPN secara online dapat berkoordinasi secara intens dengan para Admin Instansi (<https://goo.gl/zhRmkt> | <https://goo.gl/Tn1HPn>) dan Admin Unit Kerja (<https://goo.gl/ShiFae>) yang telah ditunjuk.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

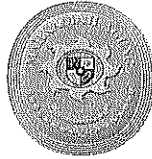


Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Para Kepala/ Ketua Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
4. Para Kepala/ Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI.



**MONITORING KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

Penarikan data per tanggal 25/04/2018

Sudah Lapor	Wajib Lapor	Belum Lapor	Total
7.395 (35,87%)	20.615	13.220 (64,13%)	35,87 %

MONITORING KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA

YUDIKATIF

MAHKAMA-HAGUNG

Pelaporan LHKPN Tahun 2017
Jenis Laporan All

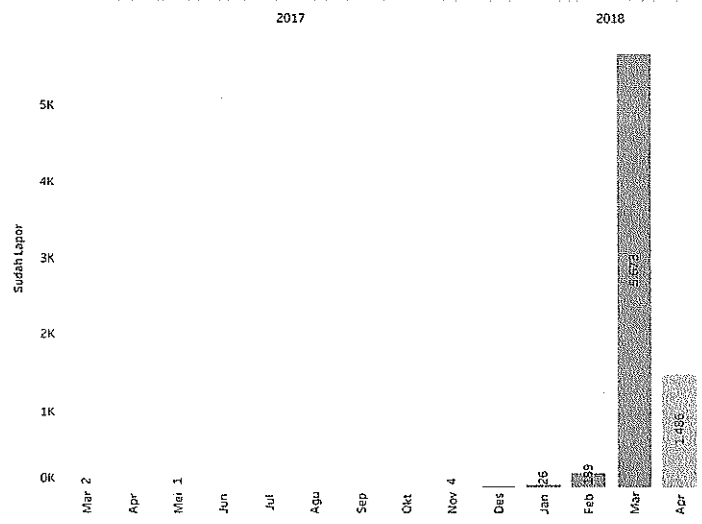
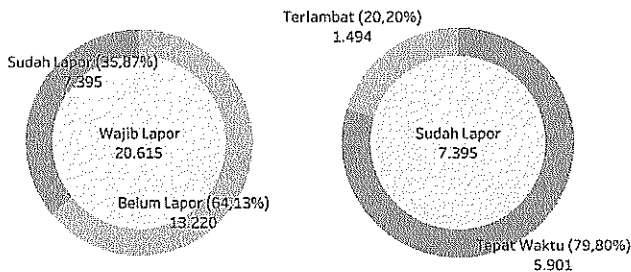
Unit Kerja All

Sub Unit Kerja All

Kepatuhan

Ketepatan Waktu

Grafik Penyampaian LHKPN



Mis. Fungsi: "Desakahan" untuk istilah "Ketepatan"

Belum Laport	Sudah Laport	Wajib Laport	Tepat Waktu	Terlambat	Total
13.220	7.395	20.615	5.901	1.494	7.395
64,13%	35,87%	100,00%	79,80%	20,20%	100,00%

NIK	Nama	Jabatan - Sub Unit Kerja - Unit Kerja	Status Akun WL	NHK	Tahun WL	Status Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Kirim	Status LHKPN	Jenis Laporan	Media Pelaporan
3326042205710003	A HUDAN SULISTIAWAN	PANITERA MUDA PERKARA HUKUM - PENGADILAN AGAMA BREBES - PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	Online	-	2017	Sudah Laport	31/12/2017	29/3/2018	Proses Verifikasi	Periodik	e-Filing
1671071008560001	A NAZORI	PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN TINGGI PALEMBANG - PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	Online	-	2017	Sudah Laport	31/12/2017	23/4/2018	Proses Verifikasi	Periodik	e-Filing
6472050706720002	A,KHAIDARSYAH	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN - PENGADILAN TINGGI SAMARINDA - PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Online	-	2017	Sudah Laport	31/12/2017	29/3/2018	Proses Verifikasi	Periodik	e-Filing
5171011407780004	A. A. GDE AGUNG JIWANDANA	HAKIM - PENGADILAN NEGERI LUMAJANG - PENGADILAN TINGGI SURABAYA	Offline	134028	2017	Belum Laport	-	-	-	-	-
5104030109690002	A. A. GEDE OKA ASTAWA	PANITERA MUDA HUKUM - PENGADILAN NEGERI BANGLI - PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Online	-	2017	Belum Laport	-	-	-	-	-
5104036906660001	A. A. RAKA HERYAWATI	PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN NEGERI BANGLI - PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Online	-	2017	Belum Laport	-	-	-	-	-
3526021210520001	A. AFANDI ZAINI	HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA -	Online	11891	2017	Sudah Laport	31/12/2017	10/4/2018	Proses Verifikasi	Periodik	e-Filing

MONITORING KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA PADA INSTANSI PUSAT & BUMN
 Penarikan data per tanggal 25 April 2018

No	Instansi	Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Kepatuhan (%)
1	PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	22	22	0	100,00%
2	PT INDAH KARYA (PERSERO)	11	11	0	100,00%
3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)	1096	1094	2	99,82%
4	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKE	1054	1045	9	99,15%
5	BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL (BASARNAS)	179	177	2	98,88%
6	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	4169	4108	61	98,54%
7	PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PPD)	61	60	1	98,36%
8	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)	303	298	5	98,35%
9	PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)	100	98	2	98,00%
10	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	93	91	2	97,85%
11	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	191	186	5	97,38%
12	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	1073	1040	33	96,92%
13	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	93	90	3	96,77%
14	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)	89	86	3	96,63%
15	KPUD (CALON KEPALA DAERAH)	1195	1146	49	95,90%
16	PT PEGADAIAN (PERSERO)	45	43	2	95,56%
17	PERUM BULOG	798	761	37	95,36%
18	PT BIO FARMA (PERSERO)	159	151	8	94,97%
19	PERUM JASA TIRTA II	72	68	4	94,44%
20	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN	726	685	41	94,35%
21	PT ASABRI (PERSERO)	137	129	8	94,16%
22	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3069	2881	188	93,87%
23	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	3182	2984	198	93,78%
24	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	153	143	10	93,46%
25	PERUM JASA TIRTA I	56	52	4	92,86%
26	PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)	14	13	1	92,86%
27	PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO)	14	13	1	92,86%
28	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.	82	76	6	92,68%
29	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	104	96	8	92,31%
30	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	26	24	2	92,31%
31	KEMENTERIAN KEUANGAN	28974	26661	2313	92,02%
32	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk.	1288	1179	109	91,54%
33	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	7139	6510	629	91,19%
34	PT SARINAH (PERSERO)	22	20	2	90,91%
35	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	30	27	3	90,00%
36	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1614	1432	182	88,72%
37	PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG	34	30	4	88,24%
38	PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	25	22	3	88,00%
39	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYA	73	64	9	87,67%
40	PT LEN INDUSTRI (PERSERO)	81	71	10	87,65%
41	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	103	90	13	87,38%
42	PUPUK INDONESIA GROUP	763	665	98	87,16%
43	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)	31	27	4	87,10%
44	PT KAWASAN INDUSTRI MAKASAR (PERSERO)	23	20	3	86,96%
45	PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)	15	13	2	86,67%
46	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)	67	58	9	86,57%
47	PT ANEKA TAMBANG (PERSERO), Tbk.	265	228	37	86,04%
48	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	35	30	5	85,71%
49	PT INDUSTRI NUKLIR INDONESIA (PERSERO)	14	12	2	85,71%
50	PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)	202	172	30	85,15%
51	PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONE	64	54	10	84,38%
52	PT SUCOFINDO (PERSERO)	32	27	5	84,38%
53	PT MRT JAKARTA	44	37	7	84,09%
54	PT WASKITA KARYA (PERSERO), Tbk.	312	261	51	83,65%
55	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)	3778	3151	627	83,40%
56	PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)	42	35	7	83,33%
57	PT PAL INDONESIA (PERSERO)	31	25	6	80,65%
58	PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)	60	48	12	80,00%
59	KOMISI YUDISIAL	35	28	7	80,00%
60	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)	10	8	2	80,00%
61	PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN, DAN RATU BOKO (PERSERO)	19	15	4	78,95%
62	KEMENTERIAN SOSIAL	603	471	132	78,11%
63	PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	203	158	45	77,83%
64	SEKRETARIAT JENDERAL MPR-RI	40	31	9	77,50%
65	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK	1345	1041	304	77,40%
66	PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PNRI)	12	9	3	75,00%
67	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	725	523	202	72,14%
68	PT ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO)	67	47	20	70,15%
69	PT NINDYA KARYA (PERSERO)	20	14	6	70,00%
70	KEMENTERIAN PERTANIAN	1514	1054	460	69,62%
71	PT PERTANI (PERSERO)	23	16	7	69,57%
72	PT KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk.	117	81	36	69,23%
73	PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)	104	72	32	69,23%
74	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)	13	9	4	69,23%
75	PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS)	48	33	15	68,75%
76	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)	35	24	11	68,57%

No	Instansi	Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Kepatuhan (%)
77	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	89	61	28	68,54%
78	PT POS INDONESIA (PERSERO)	89	61	28	68,54%
79	PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)	38	26	12	68,42%
80	PT DAHANA (PERSERO)	22	15	7	68,18%
81	PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)	25	17	8	68,00%
82	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	347	229	118	65,99%
83	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	67	44	23	65,67%
84	PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)	209	132	77	63,16%
85	SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REP	75	47	28	62,67%
86	PT DANAREKSA (PERSERO)	29	18	11	62,07%
87	SEKRETARIAT JENDERAL DPD-RI	74	45	29	60,81%
88	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	153	93	60	60,78%
89	PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)	50	30	20	60,00%
90	PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.	299	177	122	59,20%
91	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	17	10	7	58,82%
92	PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)	29	17	12	58,62%
93	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	2111	1233	878	58,41%
94	PT PERTAMINA (PERSERO)	2736	1560	1176	57,02%
95	PT BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.	165	93	72	56,36%
96	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	55	31	24	56,36%
97	PT TIMAH (PERSERO), Tbk.	56	31	25	55,36%
98	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	31	17	14	54,84%
99	PT ANGKASA PURA II (PERSERO)	678	371	307	54,72%
100	PT ISTAKA KARYA (PERSERO)	11	6	5	54,55%
101	BANK INDONESIA (BI)	5379	2896	2483	53,84%
102	PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk.	295	158	137	53,56%
103	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)	30	16	14	53,33%
104	PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK	77	41	36	53,25%
105	PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)	122	63	59	51,64%
106	PERUM DAMRI	66	34	32	51,52%
107	PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.	204	104	100	50,98%
108	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	24	12	12	50,00%
109	PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)	20	10	10	50,00%
110	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	332	164	168	49,40%
111	PERUM KEHUTANAN NEGARA (PERHUTANI)	196	96	100	48,98%
112	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk.	131	64	67	48,85%
113	SEKRETARIAT KABINET	92	44	48	47,83%
114	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	180	86	94	47,78%
115	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7421	3540	3881	47,70%
116	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)	63	30	33	47,62%
117	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)	326	153	173	46,93%
118	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	84	39	45	46,43%
119	PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)	52	24	28	46,15%
120	PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT	18	8	10	44,44%
121	BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)	171	75	96	43,86%
122	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	30	13	17	43,33%
123	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	121	52	69	42,98%
124	PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	22	9	13	40,91%
125	PT HUTAMA KARYA (PERSERO)	40	16	24	40,00%
126	KEMENTERIAN KESEHATAN	3925	1527	2398	38,90%
127	PT INDRA KARYA (PERSERO)	13	5	8	38,46%
128	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	66	25	41	37,88%
129	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.	312	116	196	37,18%
130	PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)	126	46	80	36,51%
131	MAHKAMAH AGUNG	20615	7395	13220	35,87%
132	PT ADHI KARYA (PERSERO), Tbk.	357	128	229	35,85%
133	KEMENTERIAN AGAMA	263	93	170	35,36%
134	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	215	75	140	34,88%
135	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	125	43	82	34,40%
136	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN	3458	1175	2283	33,98%
137	PT BINA KARYA (PERSERO)	15	5	10	33,33%
138	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131	41	90	31,30%
139	PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)	32	10	22	31,25%
140	PT GARAM (PERSERO)	81	25	56	30,86%
141	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4398	1285	3113	29,22%
142	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3058	888	2170	29,04%
143	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)	38	11	27	28,95%
144	PT VIRAMA KARYA (PERSERO)	47	13	34	27,66%
145	PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)	37	10	27	27,03%
146	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	15	4	11	26,67%
147	PT BARATA INDONESIA (PERSERO)	27	7	20	25,93%
148	PT ANGKASA PURA I (PERSERO)	56	14	42	25,00%
149	PT PINDAD (PERSERO)	44	11	33	25,00%
150	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2456	558	1898	22,72%
151	TENTARA NASIONAL INDONESIA	501	106	395	21,54%
152	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	63	13	50	20,63%
153	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	201	41	160	20,40%
154	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1825	370	1455	20,27%
155	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	116	21	95	18,10%

No	Instansi	Wajib Laport	Sudah Laport	Belum Laport	Kepatuhan (%)
156	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	842	152	690	18,05%
157	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	52	9	43	17,31%
158	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	407	70	337	17,20%
159	PT BERDIKARI (PERSERO)	47	8	39	17,02%
160	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS)	92	15	77	16,30%
161	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	250	36	214	14,40%
162	KEMENTERIAN PARIWISATA	114	16	98	14,04%
163	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5962	794	5168	13,32%
164	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	83	11	72	13,25%
165	DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANAS)	61	8	53	13,11%
166	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	25	3	22	12,00%
167	PT SANG HYANG SERI (PERSERO)	17	2	15	11,76%
168	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	16236	1889	14347	11,63%
169	BADAN EKONOMI KREATIF	26	3	23	11,54%
170	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)	91	10	81	10,99%
171	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)	183	19	164	10,38%
172	PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)	20	2	18	10,00%
173	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	41	4	37	9,76%
174	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	976	95	881	9,73%
175	PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)	42	4	38	9,52%
176	PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)	21	2	19	9,52%
177	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)	550	50	500	9,09%
178	MAHKAMAH KONSTITUSI	241	20	221	8,30%
179	PT YODYA KARYA (PERSERO)	28	2	26	7,14%
180	PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)	312	22	290	7,05%
181	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	324	22	302	6,79%
182	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)	28008	1814	26194	6,48%
183	KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA	11281	730	10551	6,47%
184	PT INDOFARMA (PERSERO), Tbk.	17	1	16	5,88%
185	PT KERTAS LECES (PERSERO)	18	1	17	5,56%
186	PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO)	19	1	18	5,26%
187	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	350	15	335	4,29%
188	PT WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk.	155	6	149	3,87%
189	KEMENTERIAN PERTAHANAN	83	3	80	3,61%
190	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	29	1	28	3,45%
191	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)	179	6	173	3,35%
192	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)	777	23	754	2,96%
193	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO), Tbk.	894	23	871	2,57%
194	PT HOTEL INDONESIA NATOUR (PERSERO)	41	1	40	2,44%
195	UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	45	1	44	2,22%
196	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	381	6	375	1,57%
197	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	85	1	84	1,18%
198	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	176	2	174	1,14%
199	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	199	2	197	1,01%
200	PT MERPATI NUSANTARA AIR LINES (PERSERO)	185	0	185	0,00%
201	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	181	0	181	0,00%
202	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	160	0	160	0,00%
203	KEMENTERIAN KEHUTANAN	86	0	86	0,00%
204	PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)	73	0	73	0,00%
205	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	69	0	69	0,00%
206	PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)	50	0	50	0,00%
207	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	47	0	47	0,00%
208	LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG)	43	0	43	0,00%
209	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	41	0	41	0,00%
210	PERUM PERIKANAN INDONESIA	31	0	31	0,00%
211	PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I (PERSERO)	25	0	25	0,00%
212	KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)	21	0	21	0,00%
213	PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PERSERO)	21	0	21	0,00%
214	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)	19	0	19	0,00%
215	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	19	0	19	0,00%
216	PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	18	0	18	0,00%
217	PT JAKARTA PROPERTINDO	17	0	17	0,00%
218	KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16	0	16	0,00%
219	PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	12	0	12	0,00%
220	PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III (PERSERO)	12	0	12	0,00%
221	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO)	12	0	12	0,00%
222	PT INDUSTRI GELAS (PERSERO)	11	0	11	0,00%
223	PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PERSERO)	10	0	10	0,00%
224	PT PRIMISSIMA (PERSERO)	10	0	10	0,00%
225	PT SARANA KARYA (PERSERO)	10	0	10	0,00%
226	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	9	8	1	88,89%
227	PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)	9	2	7	22,22%
228	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	9	0	9	0,00%
229	PERUM PRODUKSI FILM NEGARA (PFN)	8	8	0	100,00%
230	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)	8	5	3	62,50%
231	PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO)	8	5	3	62,50%
232	PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA (PERSERO)	8	3	5	37,50%
233	PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PERSERO)	8	0	8	0,00%
234	KANTOR STAF PRESIDEN	7	1	6	14,29%

No	Instansi	Wajib Laport	Sudah Laport	Belum Laport	Kepatuhan (%)
235	PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA (PERSERO)	7	1	6	14,29%
236	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	7	0	7	0,00%
237	BADAN RESTORASI GAMBUT	6	0	6	0,00%
238	PT AMARTA KARYA (PERSERO)	6	0	6	0,00%
239	PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)	6	0	6	0,00%
240	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)	6	0	6	0,00%
241	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	5	0	5	0,00%
242	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)	4	4	0	100,00%
243	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	4	3	1	75,00%
244	PT JAMKRIDA BALI MANDARA	4	1	3	25,00%
245	PT PANN MULTI FINANCE (PERSERO)	4	1	3	25,00%
246	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	4	0	4	0,00%
247	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	0	4	0,00%
248	PT INDUSTRI SODA INDONESIA (PERSERO)	4	0	4	0,00%
249	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO)	4	0	4	0,00%
250	PT REASURANSI UMUM INDONESIA (PERSERO)	4	0	4	0,00%
251	PT JAKARTA TOURISINDO	3	3	0	100,00%
252	KOMISI INFORMASI	3	0	3	0,00%
253	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	3	0	3	0,00%
254	PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA	3	0	3	0,00%
255	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	3	0	3	0,00%
256	PT SURVAI UDARA PENAS (PERSERO)	3	0	3	0,00%
257	PT KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO)	2	1	1	50,00%
258	PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	2	0	2	0,00%
259	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)	2	0	2	0,00%
260	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)	2	0	2	0,00%
261	KANTOR PRESIDEN	1	1	0	100,00%
262	KANTOR WAKIL PRESIDEN	1	1	0	100,00%
263	SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUK	1	1	0	100,00%
264	PERUM DJAWATAN ANGKOETAN MOTOR REPOEBLIK INDONESIA (DAMRI)	1	0	1	0,00%
265	PT ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PERSERO)	1	0	1	0,00%
266	PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (PERSERO)	1	0	1	0,00%
267	PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)	1	0	1	0,00%
268	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)	1	0	1	0,00%